BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sektor UMKM memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pemerintah mulai menata pelaksanaan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi dan juga industri. Perkembangan yang semakin meningkat di bidang ekonomi dan industri tidak lepas dari peranan perusahaan yang ada di Indonesia, baik itu perusahaan besar maupun kecil dan UMKM sendiri memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kemajuan untuk perkembangan ekonomi dan industri di dalam negeri (Halim, 2020).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang akhirnya dapat membantu dalam ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2018 melaporkan jumlah unit, UMKM mempunyai pangsa sekitar 99,99% (62 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017), sementara untuk usaha besar hanya 0,01% yaitu sekitar 5.400 unit. Hampir 97% dari angkatan kerja di Indonesia adalah tenaga kerja di sektor UMKM sedangkan 3% dari total angkatan kerja di Indonesia menempati pada usaha besar (Suyadi, 2018).

Perkembangan UMKM saat ini sangat tinggi, dikarenakan adanya keberagaman agama, budaya, adat serta wilayah yang terbagi atas pulau-pulau dan

memiliki sumber daya yang berbeda-beda, sehingga UMKM di Indonesia berkembang pesat dan cepat. UMKM pada zaman dahulu sangat handal dan dapat digunakan sebagai penopang hidup rakyat. UMKM pada zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat tanpa modal eksternal (Pardita, dkk, 2019).

UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi (Junaidi, 2023)

UMKM sendiri memiliki peran yang cukup penting bagi perekonomian nasional, pemerintah melaporkan sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah menggunakan *platform online* yang tepat untuk memasarkan produknya. Jumlah ini mewakili sekitar 8% dari total jumlah UMKM yang ada di Indonesia yaitu 59,2 juta. UMKM telah terbukti mampu mendorong dan merangsang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) tahun 2017 menunjukkan bahwa 97% lapangan pekerjaan yang disediakan oleh UMKM, sehingga berkontribusi signifikan terhadap pengurangan pengangguran di Indonesia (Yuliani, 2017). Dengan hal ini maka, UMKM dapat menjadi tumpuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan UMKM mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar lainnya yang cenderung

mengalami kemunduran dalam berbisnis. Tentunya tujuan yang paling utama setiap usaha yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, begitu juga dengan pelaku usaha, tentunya memiliki suatu tujuan tertentu selain dari mendapatkan keuntungan yang besar yaitu membantu program dari pemerintah dalam mengurangi tingkat penggangguran tenaga kerja di Indonesia (Rawun & Tumilaar, 2019). Untuk itu diperlukan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang bisa diterapkan oleh UMKM.

Pengetahuan akan pentingnya pengelolaan keuangan menjadi salah satu masalah yang seringkali terabaikan oleh para pelaku UMKM, khususnya berkaitan dengan penerapan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dan akuntansi yang benar. Masalah ini biasanya timbul dikarenakan pengetahuan dan informasi pelaku UMKM mengenai akuntansi sangat terbatas dan kebanyakan dari mereka belum sadar dan belum bisa merasakan manfaat yang akan mereka peroleh tentang laporan keuangan bagi pelaku UMKM.

Pengetahuan tentang laporan keuangan bagi pelaku UKMKM dilihat dari kegiatan dasar Proses akuntansinya yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi. Proses akuntansi dimulai dari proses mengidentifikasi peristiwa ekonomi. setelah peristiwa ekonomi/transaksi teridentifikasi, dilakukan pengukuran dan pencatatan atas akibat finansial dari peristiwa ekonomi tersebut, Setelah dilakukan pencatatan, data historis yang sesuai tersebut dikomunikasikan secara ringkas kepada pengguna dalam bentuk laporan keuangan (Risal & Wulandari, 2021).

Pelaku UMKM di Indonesia sering kali menghadapi tantangan dalam memanfaatkan informasi akuntansi untuk mengelola usaha mereka. Tantangan-tantangan tersebut termasuk rendahnya kesadaran, pemahaman, dan kesiapan terhadap peran informasi akuntansi, seperti yang dijelaskan oleh (Lazuardi & Salam, 2019). Selain itu, persepsi bahwa informasi keuangan tidak penting atau terlalu rumit, serta biaya yang besar untuk penerapan pembuatan laporan keuangan, juga menjadi hambatan bagi pelaku UMKM, seperti yang diungkapkan oleh (Zulkifli, 2021). Namun, penting untuk diingat bahwa informasi akuntansi memiliki peran yang krusial dalam pengambilan keputusan bisnis bagi UMKM, seperti yang disampaikan oleh (Putra, 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kesiapan pelaku UMKM terhadap pentingnya informasi akuntansi. Pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sumber daya yang mudah diakses dan terjangkau dapat menjadi langkah-langkah penting dalam mengatasi tantangan tersebut.

Selain itu, simplifikasi proses pembuatan laporan keuangan dan pengurangan biaya terkait juga perlu dipertimbangkan untuk memudahkan akses dan penggunaan informasi akuntansi bagi UMKM. Dengan demikian, UMKM dapat memanfaatkan informasi akuntansi secara lebih efektif dalam mengelola usaha mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Nuvitasari & Martiana, 2019), menjelaskan bahwa laporan keuangan yang dikelola oleh objek yang ditelitinya meskipun telah semua aktifitas usaha dalam kurun waktu satu tahun dilaporkan,

hanya saja dalam penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan standar akuntansi yang berdasarkan pada SAK EMKM. Namun Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk menyelami seperti apa proses pencatatan akuntansi dan sudahkah diterapkannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam pencatatan akuntansi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta kendala apa yang didapatkan oleh pelaku UMKM di kecamatan sekupang dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

Penerapan pencatatan akuntansi di salah satu UMKM di kota Pati. Mulyani dkk menjelaskan bahwa, masih banyak dijumpai ketika para pengrajin ditanya hasil yang diperoleh setiap lembar batik tidak dapat menjawab, karena rata-rata tidak dapat menghitung biaya produksi dalam membuat selembar batik. Hal ini terjadi dikarenakan para pengrajin menganggap pencatatan keuangan itu tidak penting. Menurut para pengrajin yang penting batiknya dapat laku di pasaran dan mendapatkan pesanan yang banyak (Mulyani, dkk, 2020). Dari anggapan tersebut maka memunculkan beberapa permasalahan, diantaranya: (1) pelaku UMKM belum mengetahui dan belum memahami secara baik mengenai manfaat pencatatan keuangan usaha; (2) Pelaku UMKM belum dapat menghitung biaya produksi yang dikeluarkan setiap produk yang dihasilkan; dan (3) Pelaku UMKM belum melakukan pencatatan keuangan sehingga belum dapat menyusun laporan keuangan usaha.

Penerapan SAK EMKM pada dasarnya adalah bukan sesuatu yang sulit untuk di implementasikan pada UMKM. Tersedianya informasi akuntansi tersebut

tentunya tidak telepas dari bagaimana pelaku UMKM menjalankan praktik akuntansi dalam kegiatan usahanya, sehingga informasi akuntansi dalam hal ini laporan keuangan tersedia dan dapat digunakan dalam keputusan bisnisnya (Badria & Diana, 2018).

Melihat betapa pentingnya penerapan akuntansi pada UMKM dengan memperhatikan karakteristik transasi pada UMKM, maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dibawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berupaya menerbitkan standar akuntansi yang sesuai dengan UMKM. Mulai 1 Januari 2018, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memberlakukan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) baru khusus untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM). SAK EMKM ini dibuat secara sederhana agar menjadi standar akuntansi dan keuangan yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM di Indonesia. Dengan adanya SAK EMKM diharapkan dapat menjadikan UMKM lebih maju dan mandiri misalnya UMKM dapat menyelenggarakan pencatatan atas laporan keuangan usahanya dan membantu UMKM di Indonesia menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Aspek itu selama ini menjadi tantangan terbesar UMKM Indonesia dalam mengakses permodalan dari institusi keuangan, sehingga menghambat pertumbuhan dan peran UMKM sebagai penopang ekonomi Indonesia di masa depan (Purba & Natalia, 2023).

Terdapat 15.154 UMKM di kabupaten Pati yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati pada data di tahun 2022 (opendata.patikab.go.id, 2022). Dimana jenis usahanya terdiri dari bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, industri

pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, komunikasi, keuangan, persewaan, jasa perumahan dan bidang lainnya. Masih banyak UMKM yang ada di Kabupaten Pati yang belum melakukan pencatatan laporan keuangan untuk usaha yang dijalankan (Gunawan, dkk, 2022).

Penyusunan dan pembuatan SAK EMKM didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Standar ini telah diterbitkan dengan harapan dapat membantu UMKM melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang selama ini masih dianggap kompleks ketika menggunakan SAK ETAP. Penggunaan SAK EMKM ini ditujukan untuk pengguna eksternal entitas mikro, kecil dan menengah, seperti pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha dan kreditur, dimana dalam penggunaan laporan keuangan untuk UMKM biasanya tidak memerlukan laporan keuangan yang kompleks dan mendalam (Kusuma & Lutfiany, 2019).

Kendala akuntabilitas yang dihadapi oleh sebagian besar UMKM, terutama terkait dengan kurangnya pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan, memiliki dampak yang signifikan pada pengambilan keputusan ekonomi dan keberlanjutan usaha. Informasi akuntansi memberikan dasar yang kuat untuk membuat keputusan tentang pengembangan pasar, penetapan harga, dan kemampuan usaha untuk mencapai laba (Ariono & Sugiyanto, 2018).

Partisipasi pihak ketiga, seperti bank atau program KUR, dalam memberikan dukungan modal sangat penting bagi UMKM. Namun, kurangnya laporan keuangan yang disusun dengan benar seringkali menjadi hambatan bagi

UMKM untuk mendapatkan akses terhadap modal tersebut. Hal ini juga menjadi faktor penentu bagi bank atau lembaga keuangan lainnya dalam menilai kemampuan UMKM dalam mengelola dana dan memprediksi risiko kegagalan usaha (Hanim & Noorman, 2018). Banyak pelaku UMKM yang masih mengandalkan modal pribadi karena kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Namun, penyusunan laporan keuangan bukan hanya untuk memenuhi persyaratan bank, tetapi juga untuk mengungkap keuntungan atau kerugian dalam usaha mereka. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM terkait dengan akuntansi, serta memberikan dukungan dalam penyusunan dan penggunaan laporan keuangan.

Dalam konteks penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), faktor-faktor seperti persepsi, sosialisasi, kesiapan organisasi, kinerja manajemen, pemahaman akuntansi, dan kesiapan pelaku UMKM memainkan peran penting. Diperlukan upaya yang lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan terhadap SAK EMKM agar UMKM dapat mengoptimalkan manfaatnya dalam mengelola usaha mereka.

Faktor pertama adalah persepsi pelaku UMKM, diartikan sebagai proses belajar seseorang melalui prasangka dari informasi baik dari pendengaran dan penglihatan. Persepsi pelaku UMKM bisa merubah pemikiran seseorang yang semula menganggap sulit penyusunan laporan keuangan menjadi suatu hal yang mudah sehingga pelaku UMKM akan tertib menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM (Janrosl, 2018). Hasil penelitian dari Tama, dkk (2018) membuktikan bahwa persepsi pelaku UMKM berpengaruh positif terhadap

penerapan SAK EMKM. Ketika pelaku UMKM memiliki keyakinan bahwa SAK EMKM akan memberikan manfaat bagi bisnis mereka, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mempelajarinya dan menerapkannya secara konsisten. Persepsi yang positif juga dapat meningkatkan kesiapan mereka untuk mengadopsi perubahan dan mempengaruhi lingkungan bisnis mereka untuk mengikuti tren yang sama. Sebagai hasilnya, penerapan SAK EMKM menjadi lebih lancar dan efektif, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja keuangan UMKM, serta memperkuat posisi bisnis mereka dalam pasar (Tama, dkk, 2018). Dalam penelitian lain, persepsi pelaku UMKM berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM (Febriyanti & Wardhani., 2018). Penelitian dari Lutfiany dan Kusuma (2019) membuktikan bahwa persepsi pelaku UMKM memiliki pengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM (Kusuma & Lutfiany, 2019).

Faktor kedua yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM yaitu sosialisasi SAK EMKM. Sosialisasi SAK EMKM yaitu suatu proses individu belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan tertentu serta bagaimana mengkoordinasikan perilakunya dengan perilaku orang lain dan belajar sesuai dengan peranan. Sosialisasi SAK EMKM sangat mendukung pelaku UMKM dalam memahami bagaimana cara penggunaan dan keuntungan menggunakan SAK EMKM dan peraturan yang sudah ditetapkan yaitu SAK EMKM (Pertama & Sutapa, 2020).

Banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan SAK EMKM antara lain penelitian yang dilakukan oleh Tama, dkk (2018) tentang persepsi pengusaha UMKM dan *Organizational Change Readiness* yang memiliki

pengaruh yang signifikan pada penerapan SAK EMKM. Ada kemungkinan pengaruh ini juga bisa terjadi pada penerapan SAK EMKM untuk UMKM di Kota Pati atau mungkin sebaliknya yaitu tidak adanya pengaruh pada penerapan SAK EMKM di Pati (Tama, dkk, 2018). Ada juga penelitian dari Pertama dan Sutapa (2020) mengenai persepsi pelaku UMKM dan sosialisasi SAK EMKM yang tidak berpengaruh positif pada penerapan SAK EMKM di Denpasar. Ada kemungkinan di kota Pati untuk masalah ini juga tidak memiliki pengaruh pada penerapan SAK EMKM terhadap pelaku UMKM yang ada di kota Pati dan juga sebaliknya (Pertama & Sutapa, 2020). Penelitian dari Pardita, dkk (2019) tentang tingkat penerapan sistem pencatatan akuntansi, tingkat pemahaman akuntansi, dan tingkat kesiapan pelaku UMKM yang memiliki pengaruh positif dan signifikan pada penerapan SAK EMKM di kabupaten Gianyar (Pardita, dkk, 2019). Kemungkinan di kota Pati juga memiliki pengaruh yang sama dengan yang ada di Gianyar atau bisa juga sebaliknya. Penelitian dari (Bustari & Desmiwerita, 2019) tentang kinerja manajemen UMKM yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerapan SAK EMKM di kota Padang. Bisa jadi di kota Pati memiliki pengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM seperti yang terjadi di kota Padang atau bisa jadi sebaliknya yang tidak berpengaruh sama sekali pada penerapan SAK EMKM di Pati.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel persepsi pelaku UMKM yaitu menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan ada juga yang tidak berpengaruh pada penerapan SAK EMKM sehingga peneliti ingin mencari apakah ada persamaan atau perbedaan dari penelitian terdahulu

dengan yang akan dilakukan ini. Sosialisasi SAK EMKM pada uraian diatas tidak berpengaruh positif pada penerapan SAK EMKM sehingga peneliti melakukan penelitian lagi untuk mencari adanya perbedaan yang memungkinkan sosialisasi SAK EMKM dikota Pati berpengaruh positif. *Organizational change readiness* yang berpengaruh signifikan pada penerapan SAK EMKM sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai *organizational change readiness* dengan hasil yang sama tapi dengan daerah yang berbeda yaitu di kota Pati. Kinerja manajemen UMKM yang memiliki pengaruh signifikan pada penerapan SAK EMKM, oleh karena itu peneliti ingin mencari apakah ada persamaan atau malah sebaliknya yaitu tidak berpengaruh pada penerapan SAK EMKM di Pati. Tingkat pemahaman akuntansi dan tingkat kesiapan pelaku UMKM pada uraian diatas menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan yang terjadi pada penerapan SAK EMKM di kabupaten Gianyar, sehingga peneliti ingin melihat apakah terjadi kesamaan apabila dilakukan penelitian di kota pati atau malah sebaliknya tidak ada pengaruh signifikan yang terjadi pada penerapan SAK EMKM di Pati.

Fenomena-fenomena yang dijelaskan pada penelitian-penelitan terdahulu yang membahasa laporan akuntansi, penerapan SAK EMKM dapat memberikan gambaran bahwa UMKM sangat membutuhkan pelaporan akuntansi yang baik yaiitu dengan menerapkan SAK EMKM. Maka dengan itu dilakukan penelitian ini, dengan judul **"Pengaruh Persepsi Pelaku Umkm, Sosialisasi Sak Emkm, *Organizational Change Readiness*, Kinerja Manajemen UMKM, Tingkat**

Pemahaman Akuntansi, Dan Tingkat Kesiapan Pelaku UMKM Terhadap Penerapan SAK EMKM (Studi Kasus Pada UMKM Di Kabupaten Pati)".

1.2. Ruang Lingkup

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup pokok bahasan dalam permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Meneliti tentang pengaruh Persepsi UMKM, Sosialisasi SAK EMKM, *Organizational Change Readiness*, Kinerja Manajemen UMKM, Tingkat Pemahaman Akuntansi, dan Tingkat Kesiapan Pelaku UMKM terhadap Penerapan SAK EMKM.
2. Obyek penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang ada di Kabupaten Pati dengan kriteria UMKM yaitu UMKM yang ada di Pati yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Pati.

1.3. Perumusan Masalah

SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang bagaimana pelaporan keuangan yang baik bagi pelaku UMKM. Adanya UMKM bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sehingga bisa bertahan dari keuangan yang melanda di berbagai belahan dunia. Pada dasarnya, pencatatan laporan keuangan untuk para pelaku UMKM bisa mempermudah mereka dalam usaha yang dijalankan. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMK yang belum mengetahui dan belum memahami secara baik mengenai manfaat pencatatan keuangan bagi usaha mereka. Oleh karena itu, UMKM didorong bisa

menghasilkan keuntungan yang lebih besar dengan cara melakukan pencatatan laporan keuangan yang baik dan benar.

Dilihat dari permasalahan diatas, sehingga timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Persepsi UMKM berpengaruh terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati?
2. Apakah Sosialisasi SAK EMKM berpengaruh terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati?
3. Apakah *Organizational Change Readiness* berpengaruh terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati?
4. Apakah Kinerja Manajemen berpengaruh terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati?
5. Apakah Tingkat Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati?
6. Apakah Tingkat Kesiapan Pelaku UMKM berpengaruh terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati?

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan penelitian agar tidak kehilangan makna dalam melakukan penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh Persepsi UMKM terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati.

2. Menguji pengaruh Sosialisasi SAK EMKM terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati.
3. Mengetahui pengaruh *Organizational Change Readiness* terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati.
4. Mengetahui pengaruh Kinerja Manajemen terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati.
5. Mengetahui pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati.
6. Mengetahui pengaruh Tingkat Kesiapan Pelaku UMKM terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Kegunaan Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan wawasan dan memberikan pengetahuan khususnya tentang pengaruh persepsi UMKM, sosialisasi SAK EMKM, *organizational change readiness*, kinerja manajemen UMKM, tingkat pemahaman akuntansi, dan tingkat kesiapan pelaku UMKM terhadap penerapan SAK EMKM.
b. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber masukan untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pelaku UMKM agar dalam penyusunan laporan keuangan bisa sesuai dengan SAK EMKM.